

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berdiri sendiri dan berskala kecil serta dikelola oleh kelompok masyarakat atau keluarga. UMKM sangat mempengaruhi perekonomian nasional, karena dapat menyerap jumlah pengangguran yang sangat tinggi dan memberikan kontribusi tinggi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2013, jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia mencapai 56,6 juta. Dari jumlah tersebut, 99,8% merupakan UMKM yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari total tenaga kerja yang ada saat ini di Indonesia. Usaha kecil seperti koperasi dan UMKM memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yaitu sebesar 56% (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, 2013). Dengan kata lain, UMKM dapat disebut sebagai tulang punggung perekonomian negara. Tingginya jumlah UMKM tersebut menunjukkan betapa besarnya potensi untuk mengembangkan UMKM di Indonesia agar dapat lebih berkontribusi pada negara. Tidak hanya di Indonesia saja yang merasakan dampak positif dari adanya UMKM ini, tetapi juga negara-negara lain seperti Amerika, Singapura, Malaysia dan masih banyak negara lainnya. Karena perannya yang sangat penting dalam

menunjang perekonomian nasional, maka diharapkan UMKM akan terus meningkat di setiap tahunnya sehingga jumlah pengangguran yang ada akan semakin menurun. Di Surabaya sendiri, fenomena perkembangan UMKM dapat dilihat dari tingkat kepedulian pemerintah kota Surabaya yang sangat tinggi terhadap UMKM. Seperti yang baru saja terlaksana, pemerintah kota Surabaya melalui dinas Koperasi dan UMKM terus memacu pertumbuhan UMKM melalui cara merealisasikan program penguatan modal bagi para pelaku UMKM (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, 2014).

Untuk itu, demi mempertahankan dan mengembangkan UMKM sangat dibutuhkan adanya dana sebagai modal usaha mereka untuk terus melakukan inovasi agar tetap dapat bertahan dan bersaing di pasar. Namun, seiring dengan perkembangannya tidak sedikit kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha mereka. Kendala yang banyak dihadapi yaitu kendala klasik (permodalan), akses pasar dan kualitas sumber daya manusia. Kendala lain seperti kesulitan dalam melakukan evaluasi kinerja juga sering di alami oleh banyak UMKM. Penyebabnya yaitu UMKM yang terlalu fokus pada proses produksi dan operasionalnya, sehingga tidak memperhatikan pencatatan atau pembukuan (Putra dan Kurniawati, 2012). Padahal pembukuan dalam sebuah organisasi atau bisnis sangat penting, dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan bagi manajemen, evaluasi kinerja, dan dapat digunakan sebagai informasi untuk pihak eksternal (kreditor). Meskipun saat ini telah banyak program yang dilakukan oleh

pemerintah dalam bidang permodalan. Salah satu programnya yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa di dapatkan pada beberapa bank tertentu seperti Bank Jatim dan Bank UMKM.

Program KUR adalah “kredit modal kerja dan/atau investasi kepada UMKM dan koperasi di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum *bankable*” (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, 2014). Akan tetapi, untuk mendapatkan akses permodalan pada bank seperti yang disebutkan di atas, UMKM harus memenuhi beberapa persyaratan yang dapat meyakinkan bank untuk memberikan pinjaman (kredit modal). Salah satu persyaratannya yaitu informasi yang cukup bagi pihak bank yang dituju. Pada umumnya, informasi yang dibutuhkan oleh bank sebagai pemberi pinjaman yaitu informasi keuangan yang terdapat dalam catatan akuntansi. Kenyataannya, sebagian besar pelaku UMKM tidak dapat memberikan informasi keuangan yang cukup bagi pemberi KUR (dalam hal ini adalah bank) sehingga membuat pihak bank sangat berhati-hati dalam memberikan pinjaman (Baas dan Schrooten, 2006; dalam Rudiantoro dan Siregar, 2011).

Dalam proses pengembangan usaha dan untuk mencapai keberhasilan, tidak hanya modal saja tetapi informasi keuangan dalam catatan akuntansi juga sangatlah penting bagi UMKM (Megginson *et. Al.*, 2000; dalam Pinasti 2007). Selain untuk kepentingan kreditur dan UMKM itu sendiri, informasi keuangan juga dibutuhkan terkait hubungannya dengan pihak pemerintah (dalam bidang perpajakan). Informasi akuntansi ini biasanya

berbentuk sebuah laporan yang disebut laporan keuangan. Laporan keuangan dihasilkan dari proses pencatatan akuntansi atau pembukuan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Sebenarnya di Indonesia telah ditetapkan sebuah peraturan yang mewajibkan usaha kecil untuk melakukan pencatatan akuntansi yang baik yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Selain berguna untuk mendapatkan kredit dari bank, laporan keuangan juga dapat digunakan untuk perhitungan biaya produksi, mengevaluasi kinerja, mengetahui posisi keuangan UMKM, pengambilan keputusan oleh manajer, mengontrol biaya, meningkatkan produktivitas dan masih banyak manfaat yang lainnya. Meskipun peraturan pencatatan akuntansi telah jelas adanya, namun pada kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang tidak membuat pembukuan akuntansi yang sesuai dengan standar. Untuk mengatasi masalah tersebut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 telah membuat Standar Akuntansi bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, yang disebut Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

SAK ETAP ini ditujukan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Pada dasarnya terdapat 3 pilar Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yaitu PSAK Umum, PSAK ETAP, dan PSAK Syariah (Narsa, Widodo dan Kurnianto, 2012). Jika dilihat dari tingkat kekompleksitasannya, SAK ETAP lebih

mudah untuk dipahami jika dibandingkan dengan SAK lainnya. Selain itu, SAK ETAP ini juga lebih sederhana jika dibandingkan dengan SAK pada umumnya. Kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian SAK ETAP ini hampir sama dengan kendala yang dihadapi ketika penerapan pencatatan akuntansi. Hal itu disebabkan karena UMKM masih memiliki banyak keterbatasan dalam penyusunan laporan keuangan. Pencatatan yang biasanya dilakukan oleh UMKM hanya sekedar mencatat jumlah pengeluaran dan pemasukan untuk menghitung selisihnya tetapi tidak menghiraukan apakah uang tersebut digunakan untuk kepentingan usaha atau pribadi. Jati (2009; dalam Rudiantoro dan Siregar, 2011) menyatakan bahwa mayoritas UMKM hanya melakukan pencatatan tentang jumlah dana yang diterima dan biaya yang dikeluarkan, keluar masuknya barang dan jumlah utang atau piutang yang dimiliki. Pencatatan yang seperti itu tidak dapat membantu mereka dalam mendapatkan akses ke bank. Oleh karena itu, UMKM di tuntut untuk melakukan pembukuan dalam proses bisnisnya sehingga dapat membantu mereka dalam mendapatkan kredit sebagai modal usaha, mengevaluasi kinerja, mengontrol keluar masuknya dana dan menentukan biaya yang digunakan dalam proses bisnis. Meskipun pembukuan itu hanya merupakan pembukuan sederhana. Karena dengan pembukuan tersebut UMKM dapat membantu mereka dalam mengembangkan bisnis (Narsa, dkk 2012).

Akan tetapi, penerapan SAK ETAP tidak begitu saja dapat diterima oleh UMKM. Masih banyak UMKM yang tidak

menerapkan pembukuan yang sesuai standar. Hal tersebut disebabkan oleh banyak hal, (Hutagaol, 2012) yaitu tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam bidang akuntansi, tidak memiliki tenaga ahli yang dapat melakukan pembukuan sesuai standar, adanya persepsi bahwa usaha yang dijalankan tidak membutuhkan pembukuan tersebut, persepsi bahwa akuntansi terlalu rumit untuk dilakukan hingga tidak ada pemisahan dana pribadi dan dana yang digunakan dalam proses bisnis. Anggapan bahwa pengimplementasian SAK ETAP yang rumit dan susah dipahami dapat menambah biaya karena mereka harus menambah karyawan yang paham terhadap SAK ETAP. Oleh karena itu, mereka enggan untuk menerapkan pembukuan. Pernyataan di atas juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Said (2009; dalam Rudiantoro dan Siregar, 2011), yang menyatakan bahwa keterbatasan yang dialami oleh UMKM dalam menerapkan pembukuan disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya minimnya pengetahuan dalam pembuatan pembukuan akuntansi, rumitnya proses akuntansi, dan persepsi bahwa laporan keuangan tidak begitu penting bagi UMKM (Said, 2009; dalam Rudiantoro dan Siregar, 2011). Pinasti (2007) juga menyatakan bahwa Kecenderungan dalam penyelenggaraan dan penggunaan informasi akuntansi dalam sebuah UMKM ditentukan oleh persepsi dari pelaku UMKM itu sendiri. Oleh karena itu, untuk terselenggaranya pencatatan akuntansi agar menghasilkan laporan keuangan yang baik, maka perlu dilakukan pelatihan dan pemberian materi mengenai pentingnya pencatatan

akuntansi dengan SAK ETAP agar pelaku UMKM lebih paham (Narsa dkk, 2012). Diharapkan dengan adanya pelatihan pencatatan akuntansi dan pemahaman tentang SAK ETAP, UMKM untuk kedepannya dapat membuat laporan keuangan yang baik, sehingga dapat mempermudah UMKM dalam mencapai akses bank dan pinjaman lainnya untuk mengembangkan usaha mereka.

Penelitian ini akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Faktor-faktor yang akan dibahas meliputi pemberian informasi dan sosialisasi, latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan, lama usaha dan ukuran usaha. Objek penelitian ini yaitu UMKM dengan kategori usaha kecil dan menengah yang ada di Surabaya. Dimana UMKM di Surabaya menjadi sorotan Pemerintah kota Surabaya karena kontribusinya terhadap pendapatan daerah sangatlah besar. Sehingga pemerintah mulai memberikan fasilitas-fasilitas bagi UMKM untuk terus mengembangkan usahanya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu “apakah pemberian informasi dan sosialisasi, latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan, lama usaha dan ukuran usaha berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP”.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris apakah pemberian informasi dan sosialisasi, latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan, lama usaha dan ukuran usaha berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya, yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan topik Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP. Selain itu, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran bagi UMKM mengenai pentingnya menggunakan laporan keuangan berstandarkan SAK ETAP. Karena dengan melakukan pembukuan, UMKM dapat memberikan

informasi keuangan bagi pemberi KUR sehingga memudahkan akses ke bank. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang masalah apa yang menghambat perkembangan UMKM dan lebih mengerti kebutuhan dari UMKM. Terutama terkait dengan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan penelitian terdahulu, landasan teori yang berisi konsep teoritis yang relevan dengan perumusan masalah, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis data dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan karakteristik objek penelitian/deskripsi data, analisis data dan pembahasan dari setiap hasil analisis yang dilakukan.

BAB 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini memaparkan simpulan dari hasil penelitian yang menjawab seluruh perumusan masalah atau menjawab hipotesis, keterbatasan penelitian dan saran yang berguna bagi banyak pihak.